

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku, bank pertama kali didirikan dalam bentuk sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Dapat dikatakan Bank adalah Badan Usaha yang secara garis besar bergerak di bidang keuangan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Aktivitas perbankan adalah sebagai perantara (*intermediaries*) menghimpun dana dari pihak yang kelebihan (*surplus unit*) dan menyalurkan kepada pihak yang kekurangan/membutuhkan dana (*deficit unit*).

Pengumpulan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus unit*) maka Bank akan menarik perhatian berupa balas jasa dalam bentuk bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan uangnya di Bank. Sesuai fungsinya sebagai lembaga *intermediaries*, setelah bank menghimpun dana dari masyarakat maka bank menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan (*deficit unit*). Penyaluran kredit atau *lending* juga dikenakan balas jasa dari debitur ke

bank berupa pemberian besaran bunga kredit. Besarnya bunga kredit yang diberikan oleh bank dipengaruhi berbagai faktor seperti suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*), besarnya bunga deposito bank dan kondisi ekonomi. Sesuai dengan fungsi bank yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Hasibuan (2009:4) tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat.

Dimitri Gavalas, (2015:28) dampak dari *subprime mortgage* tidak hanya dirasakan di Amerika saja, namun juga dirasakan di berbagai negara. Hal ini menyebabkan terdepresiasinya mata uang, tekanan inflasi dan meningkatnya suku bunga yang berakibat pada terganggunya penyaluran kredit. Krisis ekonomi ini mengakibatkan adanya kesadaran terhadap peningkatan regulasi secara global. G20 menginisiasikan upaya dalam membangun *new framework* dari regulasi institusi finansial.

Membangun sebuah *new framework* dalam sebuah regulasi untuk mengantisipasi krisis ekonomi pada perbankan sangat perlu dilakukan. Ketentuan kebutuhan modal berdasarkan *Bank for International Settlement* (BIS) adalah ketentuan minimal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8%. Namun sesuai dengan *Bank for International Settlement* (BIS) bahwa setiap negara boleh melakukan penyesuaian kebutuhan modal dengan mempertimbangkan kondisi setiap negara. Ketentuan tersebut juga ditegaskan lagi oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Peraturan Bank Indonesia menyatakan

bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus dimiliki oleh bank adalah minimal sebesar 8% .

Statistik Perbankan Indonesia (SPI) lebih dari 90% Dana Pihak Ketiga (DPK) berada di Bank Umum. Penempatan DPK penting bagi suatu bank karena digunakan sebagai penunjang utama perbankan salah satunya penyaluran kredit.

Berikut adalah perbandingan antara tingkat penyaluran Dana Pihak Ketiga terhadap Bank Umum (*Commercial Bank*), Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Bank*) dan Bank Syariah (*Shariah Bank*) dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1

DPK Perbankan Nasional Periode 2014-2017

Jenis Bank	Dana Pihak Ketiga (Dalam Persentase)			
	2014	2015	2016	2017
Bank Umum (<i>Commercial Bank</i>)	89,54%	89,88%	89,58%	89,33%
Bank Syariah (<i>Shariah Bank</i>)	4,74%	4,70%	5,17%	5,65%
BPR (<i>Rural Bank</i>)	1,27%	1,37%	1,40%	1,43%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 terlihat bahwa persentase penempatan Dana Pihak Ketiga pada perbankan nasional pada periode waktu 2014-2017 mayoritas masyarakat menempatkan dananya pada bank umum dengan rata-rata 89% dari total Dana Pihak Ketiga perbankan nasional lalu disusul oleh Bank Syariah pada kisaran 4% dan BPR pada kisaran 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Umum (*Commercial Bank*) memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya pada tingkat penyaluran kredit sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan perekonomian nasional.

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa pada setiap tahunnya masyarakat lebih memilih Bank Umum sebagai tempat untuk menempatkan dananya dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Terlihat pada tahun 2014 sebesar 89,54%DPK disimpan pada Bank Umum. Sehingga presentasi 89,54% yang berarti dari 100 persen dana pada bank umum sebesar 89,54 persen berasal dari Dana Pihak Ketiga(DPK) pada sumber dana bank umum tahun 2014.

Pada tahun 2015 DPK untuk Bank Syariah mengalami penurunan sebesar 0,4% dari tahun 2014. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor seperti permodalan yang kecil, biaya dana yang mahal, biaya operasional yang belum efisien, layanan yang belum memadai serta kualitas SDM dan teknologi yang masih tertinggal jauh (bi.go.id). Beberapa usaha untuk menaikkan DPK pada Bank Syariah antara lain memberikan bagi hasil dan pembiayaan yang tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan (Iskandar, 2013:58).

Bank Perkreditan Rakyat mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 1,36 persen. Peningkatan ini terjadi karena BPR terus melakukan perbaikan dalam sistem operasional dan memberikan penawaran jasa yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi perkembangan pada DPK di masing-masing jenis bank. Dana yang sudah dihimpun oleh bank selanjutnya akan dilakukan pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah penyaluran kembali dana tersebut dalam rangka kegiatan bank. Pengalokasian dana terbesar bank adalah dengan melalui pemberian kredit. Pemberian kredit dilakukan selain sebagai tugas bank yaitu peningkatan taraf hidup, kredit juga adalah sebagai sumber utama pemasukan bank. Keuntungan yang diperoleh bank dari kredit adalah selisih antara bunga

deposito dan bunga kredit.

Penilaian terhadap pemberian kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Kasmir (2014:136) Pemberian kredit melalui analisis prinsip 5C adalah penilaian terhadap *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Analisis lainnya dapat melakukan metode 7P yaitu penilaian terhadap *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection* (Kasmir, 2014: 138).

Bank selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kegiatan operasional bank. Hal tersebut dapat diperlihatkan melalui rasio *Nonperforming Loan* (NPL). Menurut Ismail (2009:226), NPL (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari. Dimana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pandia (2012:71), *Net Interest Margin* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio NIM dapat menunjukkan pengelolaan aktiva produktif dalam menghasilkan laba baik. Rasio NIM yang semakin besar menunjukkan baiknya bank dalam menjalankan fungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui penyaluran kredit.

Perbankan saat ini, tidak hanya berfokus pada pemberian kredit namun juga melakukan kegiatan lainnya untuk meningkatkan *profit*. Diversifikasi menunjukkan bahwa, bank mengalami pergeseran fungsi

utama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kredit. Diversifikasi yang dilakukan oleh bank juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan bank, sehingga terjadi peningkatan efisiensi terhadap operasional bank. Peningkatan efisiensi terhadap kegiatan operasional bank penting, karena dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mendapatkan profit. Tingkat efisiensi bank sering diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO menjadi rasio yang penting karena digunakan sebagai indikator tingkat efisiensi bank. BOPO juga merupakan rasio yang diperhatikan oleh Bank Indonesia sebagai indikator kesehatan bank. Tingkat efisiensi bank yang diukur melalui rasio BOPO ini adalah perbandingan antara Beban Operasional seperti biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah, kewajiban bunga hutang, biaya administrasi dan lain sebagainya; dibandingkan dengan Pendapatan Operasional seperti pendapatan pembayaran kembali kredit beserta bunga kredit, pendapatan bunga surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Semakin kecilnya rasio BOPO, maka mengindikasikan bahwa bank tersebut meningkatkan efisiensinya untuk dapat meningkatkan profitabilitas bank tersebut (Febrianto, 2013:55).

Bank Indonesia, dana-dana yang dimiliki Bank Umum terdapat pada Dana Pihak Ketiga (DPK), Giro Wajib Minimum (GWM), kewajiban pada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, kewajiban lainnya dan setoran jaminan. Dari berbagai macam sumber dana yang dimiliki bank tersebut, DPK memiliki porsi yang paling besar. Berdasarkan data pada SPI, DPK mempunyai persentase sebesar 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Memperhatikan struktur keuangan yang ada di bank, yang

mana hampir seluruhnya berasal dari masyarakat atau DPK, sudah sepatutnya bank untuk menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sebagai amanat Undang-undang.

Permasalahan kredit membuat BI membuat kebijakan terkait dengan ketahanan Bank terhadap resiko *Nonperforming Loan*. Kebutuhan modal minimum yang diwajibkan *Bank for International Settlement (BIS)* adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar 8%. Angka tersebut adalah angka standar yang ditetapkan secara global, sehingga setiap negara diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap angka tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh tiap negara.

Non Performing Loan (NPL), *Net Interest Margin (NIM)*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *BI Rate*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan jumlah penyaluran kredit dari tahun 2014-2017 ditampilkan dalam Tabel 1.2

Tabel 1. 2

**BI Rate, NPL, NIM, CAR, BOPO dan Kredit
Periode 2014-2017**

Variabel	2014	2015	2016	2017
BI Rate	7,50% -7,75%	7,50% - 7,75%	4,75% - 7,25%	4,25%- 4,75%
NPL	2,16%	2,48%	2,92%	2,59%
NIM	4,23%	5,39%	5,63%	5,32%
CAR	19,57%	21,39%	22,93%	23,18%
BOPO	76,29%	81,49%	82,22%	78,64%
Kredit (M)	3.674.308	4.057.904	4.377.195	4.737.972

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank Umum periode tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Hukum permintaan dan penawaran uang berlaku bila diperhatikan melalui BI *Rate*. Pada tahun 2016 interval BI *Rate* mengalami penurunan salah satu penyebabnya adalah **pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I 2016 berpotensi terus membaik, terutama didukung oleh akselerasi stimulus fiskal** (Sumber: bi.go.id). Peningkatan BI *Rate* ini tidak sejalan dengan pemberian kredit yang selalu meningkat setiap tahunnya. Fenomena juga terjadi pada *Nonperforming Loan* (NPL), dimana dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dari 1,76% menjadi 2,92%. *Nonperforming Loan* (NPL) adalah variabel yang menjelaskan tentang kegagalan atau macetnya kredit yang diberikan oleh bank. Peningkatan *Nonperforming Loan* (NPL) seharusnya membuat pemberian kredit turun, namun menurut paparan dalam tabel bahwa penyaluran kredit tetap meningkat, sehingga hal tersebut mengindikasikan hubungan negatif.

Fenomena terjadi pada *Net Interest Margin* yang digunakan sebagai variabel dalam menghitung bunga bersih terhadap rata-rata aktivaproduktifnya. Pergerakan NIM mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016 4,23% menjadi 5,63% dan pada sisi penyaluran kredit mengalami peningkatan sehingga mengindikasikan positif. Pergerakan NIM pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 0,31%, pada sisi kredit mengalami peningkatan sehingga mengindikasikan negatif.

Kecenderungan terjadi pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat kecukupan modal

bank, dalam menghadapi resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Pergerakan CAR pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan secara berturut-turut yakni 18,01%, 19,00%, 21,19% dan 23,18%, sedangkan pada sisi penyaluran kredit mengalami peningkatan mengindikasikan hubungan positif. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Fenomena juga terjadi pada rasio BOPO, yang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016 tiap tahunnya. BOPO atau Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisien bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah nilai BOPO, bank memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, maka pendapatan atau profitabilitas akan naik. Kenaikan pada variabel BOPO pada tahun 2014-2016 tidak sejalan dengan kenaikan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank.

Data pada variabel penelitian yang dilakukan pada periode waktu 2014-2017 tidak sesuai dengan variabel penelitian yang mempengaruhi penyaluran kredit, dimana pada saat Bank Indonesia meningkatkan BI *Rate*, laju pertumbuhan penyaluran kredit terus terjadi. Fluktuasinya tingkat *Nonperforming Loan* dan turunnya *Capital Adequacy Ratio*, penurunan *Net Interest Margin* serta peningkatan rasio BOPO juga tidak sejalan dengan jumlah penyaluran kredit yang semakin meningkat dilakukan oleh bank umum.

Bertitik tolak dari masalah-masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum *Go Public* Periode Tahun 2014-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran NPL, NIM, BOPO, *BI Rate*, CAR dan penyaluran kredit pada Bank Umum yang telah *go public* periode tahun 2014-2017?
2. Apakah NPL, NIM, BOPO, *BI Rate* dan CAR secara parsial, berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang telah *go public*?
3. Apakah NPL, NIM, BOPO, *BI Rate* dan CAR secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum yang telah *go public*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran NPL, NIM, BOPO, *BI Rate*, CAR dan penyaluran kredit pada bank umum yang telah *go public* periode tahun 2014-2017.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh NPL, NIM, BOPO, *BI Rate* dan CAR secara parsial terhadap penyaluran kredit pada bank umum yang

telah *go public*.

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh NPL, NIM, BOPO, BI *Rate* dan CAR secara simultan terhadap penyaluran kredit pada bank umum yang telah *go public*.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :

1. Bagi Pihak Bank

Memberikan referensi untuk membantu mengetahui tentang penyaluran kredit perbankan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya, baik yang menghambat maupun mendukung, sehingga pihak bank dapat memperbaiki tingkat penyaluran kredit.

2. Bagi Peneliti Lain

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran terkait variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran kredit di bank umum.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyaluran kredit pada bank umum, serta mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.